



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

AMANAT

UPACARA HARI ULANG TAHUN KE-80
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



PENGADILAN BERMARTABAT
NEGARA BERDAULAT



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

- Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
- Yang Mulia Para Hakim Agung dan Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
- Yang Terhormat Panitera, Sekretaris, dan Para Pejabat Eselon I, serta Para Panitera Muda dan Para Pejabat Eselon II pada Mahkamah Agung;
- Yang Terhormat Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, segenap Pengurus Dharmayukti Karini Daerah dan Cabang, beserta seluruh anggota;
- Yang Terhormat Para Hakim Tinggi Yustisial, Para Hakim Yustisial, Para Pejabat Eselon III dan IV, Para

Pejabat Fungsional, serta segenap warga peradilan di seluruh Indonesia, yang Saya banggakan;

Bapak, Ibu, Hadirin yang Saya muliakan,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam suasana yang khidmat dan penuh rasa syukur.

Delapan dekade bukanlah usia yang pendek. Di usia ke-80 tahun ini, Mahkamah Agung telah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa, sekaligus pengawal tegaknya hukum dan keadilan dalam setiap fase kehidupan bernegara.

Tema yang kita angkat tahun ini, “Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat”, bukan sekadar slogan. Ia merupakan komitmen mendalam, yang mencerminkan kesadaran bahwa martabat sebuah pengadilan, adalah fondasi dari kedaulatan sebuah negara hukum.

Pengadilan yang bermartabat adalah pengadilan yang menjaga independensi, menegakkan integritas, dan memberikan keadilan secara adil dan setara kepada siapa pun. Di sanalah letak kekuatan negara hukum yang sejati. Sebaliknya, ketika martabat pengadilan goyah karena intervensi, korupsi, atau penyimpangan, maka kedaulatan negara pun ikut terguncang.

Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno: *“Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dari keadilan. Jika semua lembaga telah gagal, maka kepada Mahkamah Agung-lah rakyat berharap.”*

Kutipan ini menjadi pengingat bahwa Mahkamah Agung memikul tanggung jawab moral, untuk senantiasa menjaga kepercayaan rakyat. Pengadilan tidak boleh menjadi menara gading yang hanya sibuk dengan formalitas hukum dan terisolasi dari realitas sosial, tetapi harus berdiri kokoh sebagai penjaga keadilan, yang hidup dan berdenyut bersama rakyat.

PERAN PENGADILAN BAGI KEDAULATAN NEGARA

Bapak, Ibu, Hadirin yang Saya muliakan,

Pengadilan memiliki peran strategis sebagai penjaga supremasi hukum (*the guardian of the rule of law*). Di sanalah tercermin komitmen dalam menegakkan keadilan: apakah ia benar-benar hadir bagi seluruh warga negara, atau berpihak hanya pada kelompok tertentu.

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan memang berada di tangan rakyat. Namun, kedaulatan itu hanya bisa bermakna nyata, apabila dijaga oleh hukum yang adil dan ditegakkan oleh lembaga peradilan yang bebas dari tekanan politik, kekuasaan, atau kepentingan sesaat.

Ketika pengadilan mampu bersikap adil dan berwibawa, maka ia menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik, menegakkan hak asasi manusia, dan memperkuat legitimasi negara di mata rakyat maupun dunia internasional.

Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif, tetapi juga memelihara pilar-pilar dasar negara berupa keadilan, ketertiban, dan kedaulatan.

Terkait fungsi tersebut, terdapat ungkapan populer dari Lord Hewart selaku Lord Chief Justice of England tahun 1922 hingga 1940, bahwa: "*Justice must not only be done, but must manifestly and undoubtedly be seen to be done.*"

Pernyataan tersebut mengajarkan bahwa prosedur dan hasil adalah dua hal yang sama pentingnya. Keadilan harus dirasakan dan terlihat oleh masyarakat. Pengadilan yang bermartabat, tidak cukup hanya benar secara hukum, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan publik melalui transparansi, keterbukaan, dan sikap yang menjunjung tinggi etika.

CAPAIAN DAN TANTANGAN

Hadirin yang saya muliakan,

Delapan puluh tahun Mahkamah Agung telah banyak mencatatkan langkah-langkah penting, antara lain: kita telah menata ulang manajemen perkara secara digital melalui e-Court dan e-

Litigation, mewujudkan kolaborasi antar-lembaga melalui sistem e-Berpadu, menyederhanakan proses administrasi peradilan, mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan tetap menjaga kualitas putusan, dan membuka akses publik terhadap putusan melalui Direktori Putusan sebagai bentuk akuntabilitas.

Semua itu adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel, sebagai suatu cerminan dari pengadilan yang bermartabat.

Namun kita juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih kita hadapi, yaitu: masih ada persepsi negatif terhadap lembaga peradilan, masih ada keluhan masyarakat tentang akses terhadap keadilan, dan masih ada godaan dan tekanan terhadap independensi hakim dan aparat peradilan.

Di tengah tuntutan zaman yang terus berubah, Mahkamah Agung harus terus beradaptasi, tanpa mengabaikan jati dirinya sebagai benteng terakhir keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta: *“Negara hukum yang demokratis menuntut keadilan yang hidup dalam perbuatan, bukan hanya dalam perkataan.”*

Pesan ini mengingatkan kita, bahwa martabat pengadilan tidak cukup ditopang oleh teks undang-undang, tapi oleh keteladanan dan keberanian moral dalam menegakkan keadilan.

Sebagai Ketua Mahkamah Agung, Saya mengajak seluruh insan peradilan: mari kita jaga martabat peradilan, bukan hanya

melalui aturan, tetapi melalui sikap hidup yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan rasa keadilan.

Mari kita tumbuhkan kembali budaya hukum yang adil dan beradab, dimulai dari diri kita sendiri, di ruang sidang, di meja kerja, dan dalam setiap keputusan yang kita ambil.

Untuk mengakhiri amanat ini, izinkan Saya menyampaikan pesan sederhana namun penuh harapan: **“Selama pengadilan berdiri tegak dengan martabatnya, maka selama itu pula negara ini akan berdiri kokoh dalam kedaulatannya.”**

Selamat ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing langkah kita, dalam menegakkan keadilan demi kemuliaan bangsa dan negara.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq,

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 19 Agustus 2025

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. SUNARTO, S.H., M.H.